

RENJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KAB. LUWU
TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah di sebut pada pasal 263 ayat (4) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023 ini.

Malili, 16 Februari 2022

PIt.SEKRETARIS DPRD,

ASWAN AZIS,S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. :19760316 200803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN IV.....	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sampai Triwulan IV dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	27
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	48
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	48
3.2 Program dan Kegiatan	50
BAB. IV : PENUTUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat . Peran serta lembaga DPRD penting mengingat lembaga legislative di daerah mempunyai fungsi Pengawasan (Controlling) , Fungsi Penyusunan Peraturan Daerah (Legislasi) Serta Fungsi Anggaran (Budgeting).

Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah berbasis potensi sumber daya daerah, aspirasi masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional . Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 erat kaitannya dengan dokumen – dokumen lain yang menjadi prioritas Pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Aturan-aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah :

1. Bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 71 : kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleng-

garaan Pemerintah Daerah Pasal 5, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf (a) terdiri atas:

- a. Capaian kinerja makro;
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - c. Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan Good and Clean Governance. Disamping itu Rencana Kerja Perubahan ini dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan dalam pencapaian visi, misi dan program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan renja Tahun 2023 ini antara lain :

1. Tersusunnya instrument rencana kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja pembangunan

3. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD kabupaten Luwu Timur
4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu setelah penetapan perubahan dari anggaran pokok.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut

:

BAB I			Pendahuluan
		1.1	Latar Belakang
		1.2	Landasan Hukum
		1.3	Maksud dan Tujuan
		1.4	Sistematika Penulisan
BAB II			Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s.d TW IV Tahun 2022
		2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Resnstra SKPD a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan d. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
		2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra/Indikator Kinerja Utama (IKU)
		2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
		2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD
		2.5	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III			Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
		3.1	Telaahan terhadap kebijakan nasional
		3.2	Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023
		3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV			Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luw Timur menetapkan Sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun anggaran 2021 – 2026, dijababarkan pula Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD seperti terlihat pada **Tabel 2. 1.**

Secara Umum evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2023 dilakukan dengan cara mengkaji antar target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah terwujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur Tahun 2022 secara umum selaras dengan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, begitupun pada Renja Perubahan Tahun ini. Pada Renja Perubahan ini ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan anggaran baik itu dengan pergeseran anggaran maupun yang mengalami penambahan anggaran. Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu timur 2021 sampai triwulan IV diuraikan sebagai berikut : **Tabel 2.1.**

Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD		Cakupan Kinerja Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	71%	78%	85%	92%	100%
		Meningkatkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	83,33	85,04	88,67	97,07	100%
		Meningkatnya kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi pengawasan dan Anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Persentase Rekomendasi DPRD yang direncanakan dan ditindaklanjuti	77,27	80,87	100	100	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Nilai SAKIP Sekretariat Dewan	B	BB	BB	A	AA
		Meningkatnya kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	80%	80%	80%	80%	80%

- Pada Renja Tahun 2021 terdapat 2 (dua) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 61 (Enam Puluh Satu) sub kegiatan.
- Realisasi Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Indikator Program adalah Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (%) dengan target 100% dan realisasi 100% dengan menyerap anggaran sebesar 95,58% dan terdapat sisa anggaran Sebesar Rp.. Kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :**
 - **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Target Output Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu target 14 Dokumen dan terealisasi 14 Dokumen. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 100%. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu target 2 dokumen realisasi 2 dokumen capaian kinerja 100%.
 - b. Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu target 2 dokumen realisasi 2 dokumen capaian kinerja 100%.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu target 2 dokumen realisasi 2 dokumen capaian kinerja 100%.
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen) target 6 dokumen realisasi 6 dokumen capaian kinerja 100%.
 - **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Target Output Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 100% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 97,58%. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :**
 - a. Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayarkan target 26 orang realisasi 26 Orang capaian kinerja 100%.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan indikator kinerja Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu target 18 Dokumen realisasi 18 Dokumen capaian kinerja 100%
 - **Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD Target Output Persentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan target 100% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 97,90%. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :**

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu target 4 Dokumen realisasi 4 Dokumen capaian kinerja 100%
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Target Output Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah target 100% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 91,96%. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator kinerja Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan (orang) target 63 Orang realisasi 63 Orang capaian kinerja 100%
 - b. Pendataan dan Pengelola Administrasi kepegawaian dengan indikator kinerja Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan target 4 Dokumen realisasi 4 Dokumen capaian kinerja 100%
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan (orang) target 25 Orang realisasi 25 Orang capaian kinerja 100%
- **Administrasi Umum Perangkat daerah Target Output Persentase rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah target 100% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 91,96%. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis) target 9 Jenis realisasi 9 Jenis capaian kinerja 100%
 - b. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan & Perlengkapan kantor yang disediakan target 5 realisasi 10 capaian kinerja 200%
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan (jenis) target 2 jeni realisasi 2 Jenis capaian kinerja 100%
 - d. Penyediaan bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan (jenis) target 3 jenis realisasi 3 Jenis capaian kinerja 100%
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Exampler) target 2 realisasi 2 capaian kinerja 100%
 - f. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undnagan dengan indikator kinerja Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undnagan yang disediakan (Exampler) target 1.896 Exampler realisasi 1.896 Exampler capaian kinerja 100%
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator kinerja Jumlah Tamu yang difasilitasi (orang) target 1.000 Orang realisasi 846 Orang capaian kinerja 90%
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan target 111 kali realisasi 93 kali capaian kinerja 90%
- **pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Target Output Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan target 15 dan terealisasi 18%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 92,37%. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :**
 - a. Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja Jumlah Mebel yang diadakan (paket) target 0 Paket realisasi 0 Paket capaian kinerja 0% Kegiatan ini mengalami pengurangan dikare-

- nakan refocusing anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau stabilitas sistem keuangan
- b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan (unit) target 6 unit realisasi 6 Unit capaian kinerja 100%
 - c. Pengadaan sarana & Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Banguna Lainnya yang Diadakan (Paket) target 3 paket realisasi 3 paket capaian kinerja 100%
 - d. Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan (unit) target 9 unit realisasi 9 Unit capaian kinerja 100%
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Output Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 100% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 90,08%. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja Jumlah Surat Masuk dan keluar Yang Diagenda target 2.500 surat realisasi 2.450 surat capaian kinerja 100%
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Jumlah Rekening Bulanan telepon, Air dan Listrik kantor yang terbayarkan (rekening) target 36 rekening realisasi 36 rekening capaian kinerja 100%
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (orang) Jumlah Tenaga jasa Pelayanan yang terbayarkan target 27 orang realisasi 27 orang capaian kinerja 100%
 - **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Output Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara target 222% dan terealisasi 192%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 97,51%. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) target 11 unit realisasi 11 unit capaian kinerja 100%
 - b. Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan & Mesin Lainnya yang dipelihara (unit) target 100 unit realisasi 100 unit capaian kinerja 100%
 - c. Pemeliharaan Aset tetap Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Barang Milik daerah yang diasuransikan (unit)) target 6 unit realisasi 6 unit capaian kinerja 100%
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) target 3 unit realisasi 3 unit capaian kinerja 100%
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana & Prasarana Gedung kantor/Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah sarana & prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit) target 3 unit realisasi 3 unit capaian kinerja 100%

- **Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD Target Output Persentase Rata-rata capaian keuangan dan kesejahteraan DPRD, target 100% dan terealisasi 75%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 96,65%. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :**
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan daerah dengan indikator kinerja Jumlah Bulan gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terbayarkan (orang) target 30 orang realisasi 30 Orang capaian kinerja 100%
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD dengan indikator kinerja Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya Yang Diadakan (Pasang) target 30 pasang realisasi 30 pasang capaian kinerja 100%
 - c. Pelaksanaan Medical Chek-Up dengan indikator kinerja Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan Medical Chek Up (orang) target 27 orang realisasi 16 orang capaian kinerja 59% . sub kegiatan tidak capai target karena Sulit menyesuaikan agenda kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD dengan jadwal Medical Check-Up.
- **Layanan Administrasi DPRD Target Output Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja layanan Administrasi target 100% dan terealisasi 75%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 72%. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :**
 - a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan indikator kinerja Jumlah rapat & Konsultasi DPRD yang Diselenggarakan (kali) target 80 kali realisasi 28 kali capaian kinerja 35% , sub kegiatan ini tercapai target karena Anggarannya disediakan untuk Pelantikan Ketua DPRD namun SK Ketua DPRD tidak terbit.
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD dengan indikator kinerja Jumlah Bahan/Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan (jenis) target 2 Jenis realisasi 2 Jenis capaian kinerja 100%

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- **Indikator Program adalah Persentase Rancangan Perda Yang Difasilitasi (%) dengan target 90% dan realisasi 94,51% dengan menyerap anggaran sebesar 94,51% dan tidak terdapat sisa anggaran. Kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :**
 1. Pembahasan Kebijakan Anggaran- kegiatan ini memiliki indicator yakni Jumlah Nota Kesepakatan Dan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran, adapun sub. Keegiatannya yakni:
 - a. Pembahasan KUA Dan PPAS - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama (Nota Kesepakatan). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 2 Nota Kesepakatan dan realisasinya 2 Nota Kesepakatan
 - b. Pembahasan Perubahan KUA Dan PPAS - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama (Nota Kesepakatan). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 2 Nota Kesepakatan dan realisasinya 2 Nota Kesepakatan
 - c. Pembahasan APBD - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Ranperda Yang disetujui (Dokumen). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dan realisasinya 1 Dokumen
 - d. Pembahasan APBD Perubahan - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Ranperda Perubahan Yang disetujui (Dokumen). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dan realisasinya 1 Dokumen
 - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Yang disetujui (Dokumen). Hasil evaluasi

menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dan realisasinya 1 Dokumen

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang disusun Tepat Waktu, adapun sub. Kejadiannya yakni:
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Dan Hukum (Dokumen). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 4 Dokumen dan realisasinya 4 Dokumen
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Infastruktur - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Infastruktur (Dokumen). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 4 Dokumen dan realisasinya 4 Dokumen.
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Perekonomian (Dokumen). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 4 Dokumen dan realisasinya 4 Dokumen
 - d. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni jumlah rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 3 Rekomendasi dan realisasinya 3 Rekomendasi.
 - e. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni jumlah rekomendasi yang dihasilkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 10 Rekomendasi dan realisasinya 10 Rekomendasi
 3. Penyerapan & Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - kegiatan ini memiliki indikator yakni Persentase Meningkatnya Peran Serta DPRD dalam Menindaklanjuti Masalah Pembangunan dan Terwujudnya Jaringan Aspirasi Masyarakat, adapun sub. Kejadiannya yaitu:
 - a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Pokok-Pokok Pikiran yang terserap (kali). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 8.33% dimana ditargetkan sebanyak 12 kali dan realisasinya 1 kali.
 - b. Pelaksanaan Reses - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Reses Perseorangan yang dilaksanakan Pimpinan & anggota DPRD (kali). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 3 kali dan realisasinya 3 kali.
 4. Pelaksanaan & Pengawasan Kode Etik DPRD - kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Penegakan Pelanggaran Kode Etik, adapun sub. Kejadiannya yaitu:
 - a. Pengawasan Kode Etik - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Pengawasan Kode etik DPRD (kali). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 0% dimana ditargetkan sebanyak 0 kali dan realisasinya 0 kali. Karena pelanggaran Kode etik pimpinan dan anggota DPRD tidak ada dan sub kegiatan ini sifatnya hanya disediakan.
- Indikator kinerja Cakupan Kinerja Fungsi Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD mengalami pemetaan program, kegiatan dan sub. Kegiatan ditahun Anggaran 2021 antara lain:
 - A. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD - kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Ranperda yang telah dibahas dan disetujui untuk diperdakan, adapun sub. Kegiatannya yaitu:
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah ranperda inisiatif yang difasilitasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 0% dimana ditargetkan sebanyak 4 ranperda dan realisasinya 0 ranperda.
 - b. Pembahasan rancangan Peraturan daerah - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah ranperda yang difasilitasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 13 ranperda dan realisasinya 13 ranperda.
2. Fasilitasi Tugas DPRD - kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD, adapun sub. Kegiatannya yaitu:
 - a. Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan (Kali) dan Jumlah Rapat-Rapat Pripurna (Kali). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output sub kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 40 Kali rapat paripurna dan realisasinya 40 kali dan Koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD ditargetkan 150 kali dan realisasi 41 kali.
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi (kali). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output sub kegiatan sebesar 39,80% dimana ditargetkan sebanyak 150 Kali dan realisasinya 24 kali.
3. Pembahasan Kerja Sama Daerah - kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah (Jenis), adapun sub. Kegiatannya yaitu:
 - a. Penyusunan Bahan komunikasi dan Publikasi - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Kegiatan yang dipublikasikan (jenis). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output sub kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 5 Jenis dan realisasinya 5 Jenis
4. Peningkatan Kapasitas DPRD kegiatan ini memiliki indikator yakni Persentase rata-Rata capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas DPRD, adapun sub. Kegiatannya yaitu:
 - a. Bimbingan teknis DPRD - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Bimtek yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD (Kali). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output sub kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 3 kali dan realisasinya 3 Kali
 - b. Penyediaan Kelompok Pakar & Tim Ahli - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni *Jumlah Tim pakar & Tim Ahli yang Disediakan (orang)*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output sub kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 4 Orang dan realisasinya 4 Orang
 - c. Penyediaan tenaga Ahli Fraksi - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Tim Ahli Fraksi (Orang). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output sub kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 6 Orang dan realisasinya 6 Orang
 - d. Penyusunan Program kerja DPRD - sub. kegiatan ini memiliki indikator yakni Jumlah Laporan Program Kerja DPRD (Dokumen). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian indikator output sub kegiatan sebesar 100% dimana ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dan realisasinya 1 Dokumen

➤ **Faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah:**

1. Tersedianya anggaran yang cukup untuk masing-masing kegiatan
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran mekanisme kerja baik DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

➤ **Faktor penyebab kegagalan pencapaian target :**

1. Pemahaman SDM aparatur di bidang indikator kinerja yang terukur dan outcome dari masing-masing kegiatan masih kurang.
2. Kurangnya pemahaman aparatur tentang output belanja secara detail merupakan parameter untuk menentukan kegiatan yang dilaksanakan berkinerja.
3. Jadwal kegiatan DPRD yang padat dan belum tersusun secara maksimal sehingga sering berbenturan dengan kegiatan yang lain.
4. Kurang disiplinnya Aparatur untuk tepat waktu pengembalian SPJ.

Adapun Tabel Rekapitulasi Evaluasi Renja SEkretariat DPRD Kab.Luwu Timur dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2020 di sajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2020
KABUPATEN LUWU TIMUR

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah & Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Program (Renstra SKPD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Renja SKPD dan Pencapaian RENSTRA sd Tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur			Target Program dan Kegiatan 2021 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sd Tahun berjalan 2021		SKPD PELAKSANA
					Target Renja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2020(Tahun berjalan/	Tingkat Capaian Realisasi Target sd Tahun	

															n-1)	2020			
1								2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)*	11	12
4	0	4	0	0	0	0	0		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%							SET DPRD	
4	0	4	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dihasilkan	2500	120	120	120	100	120	360	33.33	
4	0	4	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rek Bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	36	36	36	36	100	36	108	33.33	
4	0	4	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang	6	5	0	-	-	5	10	60.00	

										diasuransikan									
4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-Jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan -Jumlah alat dan bahan pembersih yang disiapkan	21	21	20	20	100	21	62	33.87
											Jumlah alat dan bahan pembersih yang disiapkan	2	2	2	2	100	2	6	33.33
4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	199	199	146	134	92	199	532	9.40
4	0	4	0	0	0	0	1	0	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jumlah Jenis Alat tulis Kantor yang	0	33	33	33	100	9	75	44.00

										disediakan										
4	0 4	4	0 4	0 4	0 4	0 1	0 1	1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9	7	9	9	100	9	25	312.00		
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 1	0 1	1 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penunjang administrasi SKPD yang terpenuhi	2	2	2	2	100	9	13	15.38		
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 1	0 1	1 5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	1895	1,891	47,2 20	47,220	100	49568	98,679	50.23		

4	0	4	0	0	0	0	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik logistik Rumah jabatan yang disediakan	3	2	2	2	100	2	6	33.33
									Jumlah BBM yang disediakan	5300	6,250	8,41 9	6,419	76	6250	18,919	33.04
4	0	4	0	0	0	0	1	Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat, tamu, rapat yang disediakan	500	16,140	2,12 5	2,125	100	102	18,367	11.57
									Jumlah pramanan makan dan minum tamu yang disediakan	500	16,140	5,95 0	5,950	100	102	22,192	26.81
4	0	4	0	0	0	0	1	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat- rapat koordinasi yang diikuti	80	111	69	69	100	102	282	17.73

4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 1	1 9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tek nis	Jumlah Tenagapendukun g administrasi yang terbayarkan	37	30	37	37	100	37	104	35.58	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 1	2 0	Penyediaan Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga yang disediakan	2	2	2	2	100	2	6	33.33	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 1	2 3	Monitoring Dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	6	6	6	6	100	6	18	33.33	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 1	2 4	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	0	105	85	48	56	24	177	59.32	

4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 1	2 6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti MCU	30	30	30	20	67	30	80	37.50	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%						-		
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 2	0 1	Pembangunan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah jabatan pimpinan DPRD, Wakil Ketua DPRD yang ternamgun	3	4	3	3	100	3	10	30.00	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 2	0 3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah prasarana gedung yang	2	2	0	-	-	3	5	40.00	

4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 2	2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al	Jumlah kendaraan dinas operasioanal yang terpelihara dan berfungsi baik	11	9	11	11	100	9	29	37.93	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								-		
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 3	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a	Jumlah pengadaan pakaian Dinas Anggota DPRD	63	30	30	30	100	1	61	49.18	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 3	0 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu	0	30	0	-	-	1	31	96.77	

4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%									
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 5	0 3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	25	23	19	19.00	100	12	54	42.59		
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											

4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 6	0 2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semest eran dan akhir tahun yang disusun	18	2	2	2	100	16	20	10.00
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 6	0 5	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen Lakip yang disusun	10	1	1	1	100	1	3	33.33
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 8		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		100%					-		
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	0 8	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	3	6	6	6	100	4	16	37.50

								Penganggaran SKPD	yang disusun										
4	0 4	4	0 4	0 4	0 4	1 5	0	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100%						-			
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	1 5	0 5	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimbingan teknis yang di ikuti pimpinan dan anggota DPRD	3	3	2	2	100	3	8	37.50		

4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	1 5	1 0	Penyediaan Jasa Konsultasi/Tena ga Ahli bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah tim pakar yang disediakan	3	5	0	-	-	4	9	55.56	
									Jumlah tenaga ahli yang disediakan	6	6	6	6	100	4	16	37.50	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 6		Program Persidangan dan Perundang- Undangan DPRD		90%								
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 6	0 1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang difasilitasi	13	14	8	7	88	11	32	56.25	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 6	0 2	Penyusunan Perda Inisiatif DPRD	Jumlah Ranperda Inisiatif yang difasilitasi	4	-	0	-	-	-	-	-	

4	0	4	0	0	0	7	0	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah sosialisasi rancangan perda	0	-	0	-	-	-	-	-	
4	0	4	0	0	0	7	0	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat- rapat paripurna fasilitasi	40	35	35	35	100	45	115	39.13	
4	0	4	0	0	0	7	0	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat- rapat alat kelengkapan Dewan	22	250	90	90	100	324	664	37.65	
4	0	4	0	0	0	7	0	Kominikasi, Publi kasi dan kprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan yang dipublikasikan	5	5	3	3	100	5	13	38.46	
4	0	4	0	0	0	7	0	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan	0	225	65	51	78	85	361	22.16	

									Dalam Daerah	Anggota DPRD yang dilaksanakan										
4	0	4	0	0	0	7	0	0	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Luar Daerah	Jumlah kunjungan kerja luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	150	183	65	65	100	111	359	50.97		
4	0	4	0	0	0	7	0	0	Penyusunan Rencana Kerja DPRD	Jumlah dokumen Renja DPRD yang dihasilkan	1	1	1	1	100	1	3	33.33		
4	0	4	0	0	0	7	0		Program Peningkatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD		90%									

4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 7	0 1	Monitoring dan Evaluasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan	12	120	1	1	100	3	124	2.42	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 7	0 2	Pembahasan Pelaksanaan Kode Etik DPRD	Jumlah penegakan kode etik DPRD	3	2	0	-	-	2	4	50.00	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 7	0 3	Kegiatan Reses	Jumlah reses perseorangan yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	3	3	3	3	100	3	9	33.33	
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 7	0 4	Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat	Jumlah hearing/dialog yang	80	2	0	-	-	2	4	50.00	

								Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	dilaksanakan										
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 7	0 5	Pembahasan LKPJ	Jumlah dokumen pembahasan LKPJ yang dihasilkan	10	1	1	1	100	1	3	33.33		
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 7	0 6	Pembahasan LHP BPK	Jumlah rekomendasi LHP BPK yang disusun	3	1	1	1	100	1	3	33.33		
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 7	0 7	Pebahasan Kua/PPAS	Jumlah nota kesepakatan yang ditetapkan bersama	4	2	2	2	100	2	6	33.33		
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 7	0 8	Pembahasan APBD/APBD-P	Jumlah Ranperda	3	3	3	3	100	3	9	33.33		

									dan Ranperda Pertanggungjaw aban APBD	APBD/APBD-P dan Ranperda pertanggungjaw aban APBD									
4	0 4	4	0 4	0 4	0 1	7 7	0 9		Pembahasan Prognosis	Jumlah Laporan semesteran yang dibahas dan diprognosis	0	-	0	-	-	2	2	100.00	

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi sekretariat DPRD.

Sesuai dengan kedudukannya, Sekretariat DPRD bertanggung jawab secara operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati. Oleh karena itu sasaran SKPD di nilai dari peningkatan pelayanan secara administrasi dan operasional.

DPRD sebagai mitra Eksekutif dalam mengawal efektifitas jalannya pemerintahan mengoptimalkan Fungsi Pengawasan, Anggaran dan Legislasi yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPRD. Sekretariat DPRD dalam hal ini berperan strategis agar optimalisasi setiap pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, pelaksanaan kerja DPRD dapat dicapai. Peran Penting DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan menjadi sasaran strategis SKPD yang dapat dicapai dengan peningkatan sumber daya dan optimalisasi pelayanan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ditampilkan dalam **tabel 2.2**

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur

NO	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Kinerja				Proyeksi			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan kinerja fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD			62,50	76,39	76,69	76,75	77,27	77,27	63,80	76,69	76,69	97,69	77,97	77,83	79,67	80,33
2	Cakupan kinerja fungsi perindang-undangan DPRD			50,00	54,55	59,09	70,00	83,33	83,33	51,63	54,55%	59,09	7	70,08	73,65%	73,65	77,78

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Sekretariat DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara Esekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan Daerah dan penyusunan Produk hukum daerah guna menunjang program – program pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Luwu Timur. Adapun Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sebagai Berikut:

- Dinamika politik yang berkembang dilembaga DPRD , akan mewarnai pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada masyarakat penyebarluasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan hasil kerja Dewan melalui berbagai macam media komunikasi kepada masyarakat tetap menjadi bagian fasilitasi kedewanan

Kebutuhan Meubeler bagi Anggota Dewan yang belum diakomodir yang menyebabkan kinerja masing-masing anggota dewan belum maksimal.

- Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

1. Permasalahan

- Dengan adanya Pandemi Covid- 19 kegiatan - kegiatan yang telah dijadwalkan kini berkurang karena pada masa Pandemi Covid-19 ini, tidak boleh mengumpulkan orang banyak.

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Hasil Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang disajikan dalam

Lampiran **Tabel 2.4** berikut ini:

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Luwu Timur

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp000)	
(1)	(2)	(#)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DAERAH	Set.DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi (%)	80,00	12.210.782.930	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DAERAH	Set.DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi (%)	80,00	12.210.782.930	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Set.DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)	70,00	2.502.332.145	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Set.DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)	70,00	2.502.332.145	

	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Inisiatif yang Difasilitasi (Ranperda)	1 Perda	68.816.605	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Inisiatif yang Difasilitasi (Ranperda)	1 Perda	68.816.605	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Set.DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan yang Terlaksana (Ranperda)	13 Ranperda	340.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Set.DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan yang Terlaksana (Ranperda)	13 Ranperda	340.000.000	Sub Kegiatan baru, dianggarkan Pada Tahun 2022
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Set.DPRD	Jumlah Ranperda yang Difasilitasi (Ranperda)	13 Ranperda	2.093.515.540	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Set.DPRD	Jumlah Ranperda yang Difasilitasi (Ranperda)	13 Ranperda	2.093.515.540	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Set.DPRD	Jumlah Nota Kesepakatan dan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran (%)	90,00	1.117.592.808	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Set.DPRD	Jumlah Nota Kesepakatan dan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran (%)	90,00	1.117.592.808	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD yang Disetujui (dokumen)	1 Dokumen	281.434.590	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD yang Disetujui (dokumen)	1 Dokumen	281.434.590	

	Pembahasan KUA dan PPAS	Set.DPRD	Jumlah Nota Kesepakatan yang Disetujui Bersama (2)	2 Nota Kesepakatan	136.644.519	Pembahasan KUA dan PPAS	Set.DPRD	Jumlah Nota Kesepakatan yang Disetujui Bersama (2)	2 Nota Kesepakatan	136.644.519	
	Pembahasan APBD Perubahan	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Perubahan Yang Disetujui (Dokumen)	1 Dokumen	281.434.590	Pembahasan APBD Perubahan	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Perubahan Yang Disetujui (Dokumen)	1 Dokumen	281.434.590	
	Pembahasan APBD	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Yang Disetujui (Dokumen)	1 Dokumen	281.434.590	Pembahasan APBD	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Yang Disetujui (Dokumen)	1 Dokumen	281.434.590	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Set.DPRD	Jumlah Nota Kesepakatan yang Disetujui Bersama (2)	2 Nota Kesepakatan	136.644.519	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Set.DPRD	Jumlah Nota Kesepakatan yang Disetujui Bersama (2)	2 Nota Kesepakatan	136.644.519	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	100,00	2.598.651.177	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	100,00	2.598.651.177	

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Set.DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Dokumen)	4 Dokumen	666.457.313	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Set.DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Dokumen)	4 Dokumen	666.457.313	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Set.DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Dokumen)	4 Dokumen	754.282.446	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Set.DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Dokumen)	4 Dokumen	754.282.446	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Set.DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Dokumen)	4 Dokumen	661.533.492	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Set.DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Dokumen)	4 Dokumen	661.533.492	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Set.DPRD	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan (Rekomendasi)	10 Rekomendasi	265.474.141	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Set.DPRD	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan (Rekomendasi)	10 Rekomendasi	265.474.141	

	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Set.DPRD	Jumlah Rekomendasi LHP yang Ditindaklanjuti (Rekomendasi)	3 Rekomendasi	250.903.785	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Set.DPRD	Jumlah Rekomendasi LHP yang Ditindaklanjuti (Rekomendasi)	3 Rekomendasi	250.903.785	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Set.DPRD	Persentase peningkatan Kapasitas DPRD (%)	80,00	1.602.855.375	Peningkatan Kapasitas DPRD	Set.DPRD	Persentase peningkatan Kapasitas DPRD (%)	80,00	1.602.855.375	
	Bimbingan Teknis DPRD	Set.DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan (Kegiatan)	3 kali	1.200.000.000	Bimbingan Teknis DPRD	Set.DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan (Kegiatan)	3 kali	1.200.000.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Set.DPRD	Jumlah Program Kerja yang Disusun (Dokumen)	1 Dokumen	4.312.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Set.DPRD	Jumlah Program Kerja yang Disusun (Dokumen)	1 Dokumen	4.312.000	

	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Set.DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Tersedia (Orang)	6 orang	252.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Set.DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Tersedia (Orang)	6 orang	252.000.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Set.DPRD	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli Fraksi yang Tersedia (orang)	3 Orang	146.543.375	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Set.DPRD	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli Fraksi yang Tersedia (orang)	3 Orang	146.543.375	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Set.DPRD	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	90,00	1.500.604.181	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Set.DPRD	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	90,00	1.500.604.181	
	Pelaksanaan Reses	Set.DPRD	Jumlah Kegiatan Reses yang Dilaksanakan (Kegiatan)	3 kali	1.495.604.181	Pelaksanaan Reses	Set.DPRD	Jumlah Kegiatan Reses yang Dilaksanakan (Kegiatan)	3 kali	1.495.604.181	
	Penyusunan Pkok-pokok pikiran DPRD	Set.DPRD	Jumlah Pokok-pokok pikiran yang terserap	12 kali	5.000.000	Penyusunan Pkok-pokok pikiran DPRD	Set.DPRD	Jumlah Pokok-pokok pikiran yang terserap	12 kali	5.000.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Set.DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik (%)	75,00	37.818.810	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Set.DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik (%)	75,00	37.818.810	

	Pengawasan Kode Etik DPRD	Set.DPRD	Persentase Kode Etik yang diawasi (%)	3 kali	37.818.810	Pengawasan Kode Etik DPRD	Set.DPRD	Persentase Kode Etik yang diawasi (%)	3 kali	37.818.810	
	Pembahasan Kerjasama Daerah	Set.DPRD	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah (%)	100,00	986.560.000	Pembahasan Kerjasama Daerah	Set.DPRD	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah (%)	100,00	986.560.000	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Set.DPRD	Jumlah Kegiatan yang dipublikasikan	5 Jenis	986.560.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Set.DPRD	Jumlah Pembahasan Kerjasama Daerah (%)	5 Jenis	986.560.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Set.DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD (%)	80,00	1.864.368.434	Fasilitasi Tugas DPRD	Set.DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD (%)	80,00	1.864.368.434	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Set.DPRD	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus yang Difasilitasi (kali)	12 kali	14.701.465	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Set.DPRD	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus yang Difasilitasi (kali)	12 kali	14.701.465	

	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Set.DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang Dilaksanakan (kegiatan)	150 kali	1.849.666.969	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Set.DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang Dilaksanakan (kegiatan)	150 kali	1.849.666.969	
		Set.DPRD	Jumlah Rapat-Rapat Paripurna (kali)	40 kali			Set.DPRD	Jumlah Rapat-Rapat Paripurna (kali)	40 kali		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Set.DPRD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100,00	23.576.734.012	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Set.DPRD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100,00	25.276.734.012	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu (%)	100,00	70.517.254	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu (%)	100,00	70.517.254	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Disusun (Dokumen)	10 dok	10.559.310	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Disusun (Dokumen)	10 dok	10.559.310	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dok	42.845.255	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dok	42.845.255	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Set.DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dok	6.814.544	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Set.DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dok	6.814.544	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Set.DPRD	jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dok	10.298.145	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Set.DPRD	jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dok	10.298.145	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik (%)	100,00	2.984.348.031	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik (%)	100,00	2.984.348.031	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18 dok	74.365.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18 dok	74.365.550	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Set.DPRD	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan Terbayarkan (Orang)	26 orang	2.909.982.481	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Set.DPRD	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan Terbayarkan (Orang)	26 orang	2.909.982.481	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase BMD yang Diadministrasikan Sesuai Standar (%)	100,00	17.952.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase BMD yang Diadministrasikan Sesuai Standar (%)	100,00	17.952.000	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	17.952.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	17.952.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	568.977.977	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	568.977.977	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Set.DPRD	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	26 orang	165.981.999	Penyediaan Jasa Konsultasi/Tenaga Ahli bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Set.DPRD	Jumlah Pakar yang disediakan	26 orang	165.981.999	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Set.DPRD	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang Dimutakhirkan (Laporan)	4 Dokumen	362.276.978	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Set.DPRD	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang Dimutakhirkan (Laporan)	4 Dokumen	362.276.978	

	Pengadaan Pakaian Dinas Besertas Atribut Kelengkapannya	Set.DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan (Stel)	63 pasang	40.719.000	Pengadaan Pakaian Dinas Besertas Atribut Kelengkapannya	Set.DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan (Stel)	63 pasang	40.719.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD (%)	100,00	1.381.043.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD (%)	100,00	1.381.043.200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Set.DPRD	Jumlah Tamu yang Difasilitasi (Orang)	1000 orang	331.130.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Set.DPRD	Jumlah Tamu yang Difasilitasi (Orang)	1000 orang	331.130.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Set.DPRD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	9 jenis	36.026.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Set.DPRD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	9 jenis	36.026.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Set.DPRD	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis)	2 jenis	141.046.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Set.DPRD	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis)	2 jenis	141.046.500	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Set.DPRD	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Diadakan (Unit)	2 jnis	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Set.DPRD	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Diadakan (Unit)	2 jnis	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Set.DPRD	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Eksamplar)	1895 explar	212.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Set.DPRD	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Eksamplar)	1895 explar	212.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Set.DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diikuti (kali)	111 kali	375.001.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Set.DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diikuti (kali)	111 kali	375.001.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Set.DPRD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan (Unit)	5 jenis	230.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Set.DPRD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan (Unit)	5 jenis	230.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Set.DPRD	Jumlah Barang Cetak dan atau Penggandaan yang Disediakan (jenis)	2 Jenis	45.739.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Set.DPRD	Jumlah Barang Cetak dan atau Penggandaan yang Disediakan (jenis)	2 Jenis	45.739.700	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Set.DPRD	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi (%)	1,00	929.745.850	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Set.DPRD	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi (%)	1,00	2.629.745.850	
	Pengadaan Mebel	Set.DPRD	Jumlah Mebel yang Diadakan (Unit)	2,00	100.000.000	Pengadaan Mebel	Set.DPRD	Jumlah Mebel yang Diadakan (Unit)	2,00	100.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Diadakan (Unit)	7 unit/paket	168.695.850	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Diadakan (Unit)	7 unit/paket	168.695.850	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Set.DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan (Unit)	3 unit/paket	1.700.000.000	Kendaraan Dinas Untuk Pimpinan DPRD sebanyak 3 Unit

	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Diadakan (Unit)	3 unit/paket	110.000.000	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Diadakan (Unit)	3 unit/paket	110.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Pengadaan Gedung atau bangunan Lainnya (Unit)	4 unit/paket	551.050.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Pengadaan Gedung atau bangunan Lainnya (Unit)	4 unit/paket	551.050.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Set.DPRD	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	897.995.920	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Set.DPRD	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	897.995.920	
	Penyediaan Surat Menyurat	Set.DPRD	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Diadministrasikan (Surat)	2400 surat	61.087.920	Penyediaan Surat Menyurat	Set.DPRD	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Diadministrasikan (Surat)	2400 surat	61.087.920	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Set.DPRD	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Dibayarkan(Orang)	28 orang	327.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Set.DPRD	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Dibayarkan(Orang)	28 orang	327.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Set.DPRD	Jumlah Rekening Telepon ,listrik,air yang Terbayarkan (Rekening)	36 Rek	509.908.000	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Set.DPRD	Jumlah Rekening Telepon ,listrik,air yang Terbayarkan (Rekening)	36 Rek	509.908.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Set.DPRD	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik (%)	100,00	613.445.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Set.DPRD	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik (%)	100,00	613.445.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /direhabilitasi (Unit)	3 unit/paket	153.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /direhabilitasi (Unit)	3 unit/paket	153.750.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Set.DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara(Unit)	11 unit	147.395.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Set.DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara(Unit)	11 unit	147.395.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara (Unit)	6 unit	54.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara (Unit)	6 unit	54.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3 unit/paket	135.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3 unit/paket	135.300.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10,00	123.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10,00	123.000.000	

	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Set.DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	100,00	14.858.008.780	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Set.DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	100,00	14.858.008.780	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Set.DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD yang Disediakan (Pasang)	30 orang/pasang	252.150.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Set.DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD yang Disediakan (Pasang)	30 orang/pasang	252.150.000	
	Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	Set.DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD yang Terbayarkan (Orang)	30 orang	14.425.858.780	Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	Set.DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD yang Terbayarkan (Orang)	30 orang	14.425.858.780	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Set.DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Check Up (Orang)	30 orang	180.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Set.DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Check Up (Orang)	30 orang	180.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD	Set.DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD (%)	100,00	1.254.700.000	Layanan Administrasi DPRD	Set.DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD (%)	100,00	1.254.700.000	

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Set.DPRD	Jumlah Barang/Perlengkapan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan (jenis)	6 Jenis	1.123.200.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Set.DPRD	Jumlah Barang/Perlengkapan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan (jenis)	6 Jenis	1.123.200.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Set.DPRD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang Terfasilitasi dengan Baik (kali)	80 kali	131.500.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Set.DPRD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang Terfasilitasi dengan Baik (kali)	80 kali	131.500.000	
	Total					35.787.516.942				37.487.516.942	

CATATAN PENAMBAHAN SUB. KEGIATAN:

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD kabupaten Luwu Timur mengacu pada **Renstra 2021-2026** dengan tetap memperhatikan program prioritas ,kegiatan prioritas dan sub kegiatan dalam dokumen rancangan RKPD Kab.Luwu Timur tahun 2023. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif, Sekretariat DPRD kabupaten Luwu Timur juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen – dokumen perencanaan yang ada, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan , terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembanguanan pada tahun yang direncanakan , sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Luwu Timur.

1.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang disajikan dalam Lampiran **Tabel 2.5** berikut ini:

Tabel 2.5

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2023
SEKRETARIAT DPRD KAB.LUWU TIMUR**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Set.DPRD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	25.276.734.012	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu (%)	70.517.254	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Disusun (Dokumen)	10.559.310	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	42.845.255	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Set.DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	6.814.544	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Set.DPRD	jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	10.298.145	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik (%)	2.984.348.031	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	74.365.550	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Set.DPRD	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan Terbayarkan (Orang)	2.909.982.481	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase BMD yang Diadministrasikan Sesuai Standar (%)	17.952.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang disusun (Dokumen)	17.952.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	568.977.977	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Set.DPRD	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	165.981.999	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Set.DPRD	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang Dimutakhirkan (Laporan)	362.276.978	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Set.DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan (Stel)	40.719.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Set.DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD (%)	1.381.043.200	<i>Diluar cakupan BPJS</i>
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Set.DPRD	Jumlah Tamu yang Difasilitasi (Orang)	331.130.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Set.DPRD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	36.026.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Set.DPRD	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis)	141.046.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Set.DPRD	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Diadakan (Unit)	10.000.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Set.DPRD	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Eksamplar)	212.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Set.DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diikuti (kali)	375.001.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Set.DPRD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan (Unit)	230.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Set.DPRD	Jumlah Barang Cetak dan atau Penggandaan yang Disediakan (jenis)	45.739.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Set.DPRD	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi (%)	2.629.745.850	
	Pengadaan Mebel	Set.DPRD	Jumlah Mebel yang Diadakan (Unit)	100.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Diadakan (Unit)	168.695.850	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Set.DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan (Unit)	1.700.000.000	Pengadaan Mobil Untuk Pimpinan 3 unit
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Diadakan (Unit)	110.000.000	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Pengadaan Gedung atau bangunan Lainnya (Unit)	551.050.000	
05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Set.DPRD	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	897.995.920	
	Penyediaan Surat Menyurat	Set.DPRD	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Diadministrasikan (Surat)	61.087.920	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Set.DPRD	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Dibayarkan(Orang)	327.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Set.DPRD	Jumlah Rekening Telepon ,listrik,air yang Terbayarkan (Rekening)	509.908.000	
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Set.DPRD	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik (%)	613.445.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /direhabilitasi (Unit)	153.750.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Set.DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara(Unit)	147.395.000	

	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara (Unit)	54.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi (Unit)	135.300.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Set.DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	123.000.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Set.DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	14.858.008.780	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Set.DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD yang Disediakan (Pasang)	252.150.000	
	Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	Set.DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD yang Terbayarkan (Orang)	14.425.858.780	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Set.DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Check Up (Orang)	180.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD	Set.DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD (%)	1.254.700.000	

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Set.DPRD	Jumlah Barang/Perlengkapan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan (jenis)	1.123.200.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Set.DPRD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang Terfasilitasi dengan Baik (kali)	131.500.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DAERAH	Set.DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi (%)	12.210.782.930	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Set.DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)	2.502.332.145	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Inisiatif yang Difasilitasi (Ranperda)	68.816.605	
20	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Set.DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan yang Terlaksana (Ranperda)	340.000.000	<i>Sub Kegiatan baru dianggarkan di tahun 2022</i>
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Set.DPRD	Jumlah Ranperda yang Difasilitasi (Ranperda)	2.093.515.540	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Set.DPRD	Jumlah Nota Kesepakatan dan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran (%)	1.117.592.808	

	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD yang Disetujui (dokumen)	281.434.590	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Set.DPRD	Jumlah Nota Kesepakatan yang Disetujui Bersama (2)	136.644.519	
	Pembahasan APBD Perubahan	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Perubahan Yang Disetujui (Dokumen)	281.434.590	
	Pembahasan APBD	Set.DPRD	Jumlah Ranperda Yang Disetujui (Dokumen)	281.434.590	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Set.DPRD	Jumlah Nota Kesepakatan yang Disetujui Bersama (2)	136.644.519	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Set.DPRD	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2.598.651.177	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Set.DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Dokumen)	666.457.313	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Set.DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Dokumen)	754.282.446	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Set.DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Dokumen)	661.533.492	

	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Set.DPRD	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan (Rekomendasi)	265.474.141	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Set.DPRD	Jumlah Rekomendasi LHP yang Ditindaklanjuti (Rekomendasi)	250.903.785	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Set.DPRD	Persentase peningkatan Kapasitas DPRD (%)	1.602.855.375	
	Bimbingan Teknis DPRD	Set.DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan (Kegiatan)	1.200.000.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Set.DPRD	Jumlah Program Kerja yang Disusun (Dokumen)	4.312.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Set.DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Tersedia (Orang)	252.000.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Set.DPRD	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli Fraksi yang Tersedia (orang)	146.543.375	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Set.DPRD	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	1.500.604.181	
	Pelaksanaan Reses	Set.DPRD	Jumlah Kegiatan Reses yang Dilaksanakan (Kegiatan)	1.495.604.181	
	Penyusunan Pkok-pokok pikiran DPRD	Set.DPRD	Jumlah Pokok-pokok pikiran yang terserap	5.000.000	

	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Set.DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik (%)	37.818.810	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Set.DPRD	Persentase Kode Etik yang diawasi (%)	37.818.810	
	Pembahasan Kerjasama Daerah	Set.DPRD	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah (%)	986.560.000	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Set.DPRD	Jumlah Kegiatan yang dipublikasikan	986.560.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Set.DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD (%)	1.864.368.434	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Set.DPRD	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus yang Difasilitasi (kali)	14.701.465	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Set.DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang Dilaksanakan (kegiatan)	1.849.666.969	
		Set.DPRD	Jumlah Rapat-Rapat Paripurna (kali)		
				37.487.516.942	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD kabupaten Luwu Timur mengacu pada **Renstra 2022-2026** dengan tetap memperhatikan program prioritas , kegiatan prioritas dan sub kegiatan dalam dokumen rancangan RKPD Kab.Luwu Timur tahun 2023. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif , Sekretariat DPRD kabupaten Luwu Timur juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen –dokumen perencanaan yang ada, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur juga disusun berdasarkan kajian usulan program ,kegiatan dan sub kegiatan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan , terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan , sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Luwu Timur.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap Misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik,realisasi, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Adapun tujuannya adalah :

- Tujuan Perangkat Daerah adalah :

Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD

➤ Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, rasional dapat dicapai untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun sasaran yaitu :

Sasaran 1

Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Sasaran 2

Meningkatkan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi legislasi DPRD dalam rangka menghasilkan perda yang berorientasi pelayanan publik yang lebih baik

Sasaran 3

Meningkatnya kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi pengawasan dan anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

Dalam bab ini juga disajikan capaian indikator Kinerja Utama (IKU), dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2023 dengan berbagai kendala. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3		-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD		Cakupan Kinerja Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	71%	78%	85%	92%	100%
		Meningkatkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	83,33	85,04	88,67	97,07	100%
		Meningkatnya kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi pengawasan dan Anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Persentase Rekomendasi DPRD yang direncanakan dan ditindaklanjuti	77,27	80,87	100	100	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Nilai SAKIP Sekretariat Dewan	B	BB	BB	A	AA
		Meningkatnya kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	80%	80%	80%	80%	80%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Rangka pelaksanaan program Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merumuskan Alokasi dana Sebesar Rp 37,487,516,942,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Se, bilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Yang terdiri dari Belanja Operasi Sebesar Rp 34,857,771,092,- dan Belanja Modal sebesar Rp 2,629,745,850,-

Realisasi penggunaan anggaran tersebut untuk pembiayaan 2 item belanja yaitu : Belanja Operasi dan Belanja Modal . Belanja Operasi dan Belanja Modal terbagi dalam kelompok belanja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sub kegiatan ini berupa Renstra, Renja Pokok, Renja Perubahan, LKPJ, LPPD dan RKPD
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD sub kegiatan ini berupa RKA pokok dan RKA perubahan
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD sub kegiatan ini berupa DPA Pokok dan DPA perubahan

4. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan berupa Lakip, kak, Rkt, Rencana Aksi, Laporan Monev dll
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan Semesteran SKPD sub kegiatan berupa laporan bulanan dan semesteran kegiatan ini juga membayarkan gaji upah jasa yang ditempatkan dibagian keuangan, dan honorarium bagi bendahara pengeluaran dan PPK SKPD;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang berupa laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusu tepat waktu.
- d. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sub kegiatan ini berupa pakaian dinas yang diadakan;
 2. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, sub kegiatan ini berupa laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan

3. dan jumlah tenaga upah jasa administrasi kepegawaian yang terbanyak;
 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan berupa : jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
- e. administrasi umum Perangkat daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan ini berupa jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan;
 3. Penyediaan peralatan rumah tangga sub kegiatan ini berupa jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan;
 4. Penyediaan bahan logistic kantor, sub kegiatan ini berupa bahan logistic kantor yang disediakan;
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan ini berupa barang cetakan dan penggandaan yang disediakan;
 6. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan berupa, jumlah bahan bacaan perundang-undangan yang disediakan
 7. Fasilitasi kunjungan tamu sub kegiatan ini berupa jumlah tamu yang difasilitasi

8. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sub kegiatan ini berupa jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan dan jumlah upah jasa sopir yang terbayarkan;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
1. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya sub kegiatan ini berupa jumlah gedung kantor yang diadakan;
 2. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, sub kegiatan ini berupa jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan;
 3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya berupa jumlah sarana dan prasana pendukung Gedung kantor lainnya yang diadakan;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat sub kegiatan ini berupa jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan;
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa jumlah rekening bulanan jasa komunikasi SDA dan listrik yang terbayarkan;

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa jumlah honorarium barang dan jasa OPD dan jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang berupa jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dipelihara yang dibayarkan pajaknya;
 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya berupa jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara;
 3. Pemeliharaan asset tetap lainnya berupa sub Kegiatan ini berupa Asuransi untuk Kendaraan Dinas Operasional ;
 4. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya berupa Pemeliharaan Gedung kantor, taman, rumah ibadah dan jaringan instalasi listrik.
 5. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya berupa pemeliharaan ruang kerja DPRD, Ruang wakil Ketua I dan II DPRD
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terdiri dari sub kegiatan :
 1. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD berupa gaji dan tunjangan anggota DPRD;

2. Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD berupa belanja pakaian Sipil Harian (PSH), pakaian dinas harian (PDH) dan pakaian sipil resmi (PSR) yang diperuntukkan untuk 30 orang anggota DPRD;
 3. Pelaksanaan Medical Check up DPRD bertujuan untuk melakukan medical chec-up bagi semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. Layanan Administrasi DPRD yang terdiri dari sub kegiatan
1. Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD berupa belanja cetak undangan, cetak spanduk, makan dan dan minum rapat, belanja jasa sewa tenda, sewa kursi, dan sewa alt studio;
 2. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD yang terdiri dari belanja bahan dan perlengkapan rumah tangga ketua DPRD dan Wakil Ketua I dan II DPRD
2. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yaitu :**
- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terdiri dari sub kegiatan :
 1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peratur Darah yang berupa ranperda inisiatif yang difasilitasi;

2. Pembahasan rancangan peraturan daerah berupa jumlah ranperda yang difasilitasi;
3. Kajian Perundang-undangan berupa jumlah ranperda yang dilaksanakan.

b. Pembahasan Kebijakan anggaran yang terdiri dari Sub kegiatan :

1. Pembahasan Kua dan PPAS bertujuan untuk menghasilkan jumlah nota kesepakatan yang di tetapkan bersama; terdiri belanja atk,cetak, fotocopy, makan dan minum rapat,perjalanan dinas luar dan dalam pprovinsi;
2. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS yang yang terdiri dari
3. Pembahasan APBD bertujuan untuk menghasilkan ranperda yabelanja atk, belanja cetak dan fotocopy, makan dan minum rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi;
4. Pembahasan APBD perubahan berupa belanja atk, cetak, penggan- daan,makan dan minum rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi
5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD berupa Jumlah Per tanggungjawaban APBD yang disetujui, berupa belanja atk, belanja fotocopy, makan dan minum rapat dan perjalanan dinas dalam provinsi.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari sub kegiatan :

1. Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum berupa, belanja atk, pengandaan makan dan minum rapat, perjalanan dinas luar dan dalam provinsi dan sewa sarana mobilitas air;
2. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur berupa atk, fotocopy, makan dan minum rapat, sewa mobilitas air, perjalanan dinas dalam dan luar provinsi dan perjalan dinas dalam daerah;
3. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian berupa, belanja atk, fotocopy, makan dan minum rapat perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar dan dalam provinsi dan sewa mobilitas air.
4. Pemabahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah terdiri dari belanja , atk, fotocopy, makan dan minum rapat, jasa tenaga ahli, sewa Gedung dan bangunan, perjalanan dinas dalam dan luar provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah;
5. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keterangan oleh badan pemeriksa keuangan terdiri dari belanja atk, fotocopy, makan dan minum rapat, jasa tenaga ahli, sewa hotel, perjalana dinas luar dan dalam provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD yang terdiri dari sub kegiatan :

1. Bimbingan teknis DPRD yang terdiri dari belanja kursus singkat/pelatihan, dan perjalanan dinas luar dan dalam provinsi;
 2. Penyediaan tenaga ahli fraksi berupa Belanja tenaga ahli fraksi sebanyak 6 orang;
 3. Penyusunan program kerja DPRD berupa belanja atk dan belanja makan dan minum rapat.
- e. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terdiri dari sub kegiatan :
1. Penyusunan pokok- pokok pikiran terdiri dari belanja atk, fotocopy, dan makan dan minum rapat;
 2. Pelaksanaan reses berupa belanja atk, fotocopy, materai makan dan minum rapat, sewa tenda, sewa sound sytem, sewa kursi dan perjalanan dinas dalam daerah;
- f. Pelaksanaan kode etik DPRD terdiri dari sub kegiatan ;
1. Pengawasan kode etik berupa belanja atk, makan dan minum rapat dan perjalanan dinas luar dan dalam provinsi.
- g. Pembahasan Kerjasama daerah terdiri dari sub kegiatan :
1. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi berupa belanja atk, cetak, belanja cendra mata, jasa kantor tenaga informasi dan teknologi, jasa iklan, website, dan perjalanan dinas dalam provinsi dan dalam daerah.
- h. Fasilitasi tugas DPRD terdiri dari sub kegiatan

1. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD berupa belanja atk, makan dan minum rapat paripurna, pembaca doa, dan perjalanan dinas luar dan dalam provinsi;
2. Fasilitasi Tugas badan musyawarah berupa belanja atk, makan dan minum rapat.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		KETERANGAN
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rata-Rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (%)	100%	24.149.017.299	APBD	100%	24.631.997.645	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	17 Dokumen	62.517.254	APBD	17 Dokumen	63.767.599	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	6.845.255	APBD	3 Dokumen	6.982.160	

						Jumlah Tenaga Upah Jasa Administrasi Perencanaan Perangkat Daerah yang terbayarkan	3 Orang	36.000.000	APBD	3 Orang	36.720.000	
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	6.298.145	APBD	2 Dokumen	6.424.108	
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4.814.544	APBD	2 Dokumen	4.910.835	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	10 Dokumen	8.559.310	APBD	10 Dokumen	8.730.496	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.927.289.551	APBD	100%	2.985.835.342	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	26 Orang	2.852.924.001	APBD	26 Orang	2.909.982.481	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Honorarium PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran yang terbayarkan	2 Orang	34.080.000	APBD	2 Orang	34.761.600	

						Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	4.285.550	APBD	18 Dokumen	4.371.261	
						Jumlah Tenaga Upah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan	3 Orang	36.000.000	APBD	3 Orang	36.720.000	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan	100%	17.600.000	APBD	100%	17.952.000	
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKP yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	5.000.000	APBD	4 Dokumen	5.100.000	
						Jumlah Honorarium Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Barang yang terbayarkan	2 Orang	12.600.000	APBD	2 Orang	12.852.000	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	496.742.909	APBD	100%	506.677.767	

4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Perengkapannya yang diadakan	63 Orang	39.900.000	APBD	63 Orang	40.698.000	
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	4 Dokumen	5.640.959	APBD	4 Dokumen	5.753.778	
							Jumlah Tenaga Administrasi Kepegawaian yang terbayarkan	25 Orang	300.000.000	APBD	25 Orang	306.000.000	
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	151.201.950	APBD	26 Orang	154.225.989	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.402.043.200	APBD	100%	1.430.084.064	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	36.026.000	APBD	9 Jenis	36.746.520	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Unit	230.000.000	APBD	5 Unit	234.600.000	

4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Jenis	10.000.000	APBD	2 Jenis	10.200.000	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	2 Jenis	141.046.500	APBD	2 Jenis	143.867.430	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	66.739.700	APBD	2 Jenis	68.074.494	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1895 Eksamp ^l	212.100.000	APBD	1895 Eksamp ^l	216.342.000	
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yang difasilitasi	1000 Orang	331.130.000	APBD	1000 Orang	337.752.600	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	111 Kali/Orang	108.000.000	APBD	111 Kali/Orang	110.160.000	
							Jumlah Upah Jasa Sopir yang terbayarkan	6 Orang	267.001.000	APBD	6 Orang	272.341.020	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	16 Unit	2.559.745.850	APBD	16 Unit	2.610.940.767	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan	2 Paket	40.000.000	APBD	2 Paket	40.800.000	

					Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan		Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan yang diadakan	3 Unit	1.700.000.000	APBD	3 Unit		Sub Kegiatan Baru
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	4 Unit	551.050.000	APBD	4 Unit	562.071.000	
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Paket	100.000.000	APBD	3 Paket	102.000.000	
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	7 Unit	168.695.850	APBD	7 Unit	172.069.767	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	888.269.970	APBD	100%	906.035.369	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan	2400 Surat	59.597.970	APBD	2400 Surat	60.789.929	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik yang terbayarkan	36 Rekening	497.472.000	APBD	36 Rekening	507.421.440	

4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Honor Pengadaan Barang dan Jasa yang terbayarkan OPD	1 Orang	4.200.000	APBD	1 Orang	4.284.000	
							Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang terbayarkan	21 Orang	315.000.000	APBD	21 Orang	321.300.000	
							Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan yang terbayarkan	1 Orang	12.000.000		1 Orang	12.240.000	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	213 Unit	599.800.000	APBD	213 Unit	611.796.000	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan dipelihara yang dibayarkan Pajaknya	11 Unit	143.800.000	APBD	11 Unit	146.676.000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	190 Unit	120.000.000	APBD	190 Unit	122.400.000	
4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	6 Unit	54.000.000	APBD	6 Unit	55.080.000	

4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	150.000.000	APBD	3 Unit	153.000.000	
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	132.000.000	APBD	3 Unit	134.640.000	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	14.500.008.565	APBD	100%	14.790.008.736	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Bulanan Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terbayarkan	30 Orang	14.074.008.565	APBD	30 Orang	14.355.488.736	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Peralengkapannya yang diadakan	30 Orang	246.000.000	APBD	30 Orang	250.920.000	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan	30 Orang	180.000.000	APBD	30 Orang	183.600.000	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Layanan Administrasi	100%	695.000.000	APBD	100%	708.900.000	

4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Rapat dan Konsultasi DPRD yang diselenggarakan	80 Kali	131.000.000	APBD	80 Kali	133.620.000	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Bahan/Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	6 Jenis	564.000.000	APBD	6 Jenis	575.280.000	
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi	90%	11.104.402.241	APBD	90%	11.326.490.286	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Ranperda yang telah dibahas dan disetujui untuk diperdakan	27 Ranperda	2.305.756.495	APBD	27 Ranperda	2.351.871.625	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Ranperda Inisiatif yang difasilitasi	1 Ranperda	62.560.550	APBD	1 Ranperda	63.811.761	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Ranperda yang difasilitasi	13 Ranperda	1.903.195.945	APBD	13 Ranperda	1.941.259.864	
					Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan yang terlaksana	13 Ranperda	340.000.000	APBD			Sub Kegiatan Baru
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Nota Kesepakatan dan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 Dokumen	917.185.950	APBD	7 Dokumen	935.529.669	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Nota Kesepakatan yang disetujui bersama	2 Nota Kesepakatan	129.822.290	APBD	2 Nota Kesepakatan	132.418.736	

4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan yang disetujui bersama	2 Nota Kesepakatan	122.822.290	APBD	2 Nota Kesepakatan	125.278.736	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Ranperda yang disetujui	1 Dokumen	103.672.190	APBD	1 Dokumen	105.745.634	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Ranperda Perubahan yang disetujui	1 Dokumen	280.434.590	APBD	1 Dokumen	286.043.282	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD yang disetujui	1 Dokumen	280.434.590	APBD	1 Dokumen	286.043.282	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	25 Dokumen	2.427.808.566	APBD	25 Dokumen	2.476.364.737	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Dokumen	605.870.284	APBD	4 Dokumen	617.987.690	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Dokumen	551.277.910	APBD	4 Dokumen	562.303.468	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Dokumen	754.282.446	APBD	4 Dokumen	769.368.095	

4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti	3 Rekomendasi	250.903.785	APBD	3 Rekomendasi	255.921.861	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	10 Rekomendasi	265.474.141	APBD	10 Rekomendasi	270.783.624	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1.164.507.450	APBD	100%	1.187.797.599	
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimtek yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	775.366.200	APBD	3 Kali	790.873.524	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	3 Orang	133.221.250	APBD	3 Orang	135.885.675	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tim Ahli Fraksi	6 Orang	252.000.000	APBD	6 Orang	257.040.000	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Laporan Program Kerja DPRD	1 Dokumen	3.920.000	APBD	1 Dokumen	3.998.400	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Meningkatnya Peran Serta DPRD dalam Menindaklanjuti Masalah Pembangunan dan Terwujudnya Jaringan Aspirasi Masyarakat	100%	1.508.396.536	APBD	100%	1.538.564.467	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran yang terserap	12 Kali	12.792.355	APBD	12 Kali	13.048.202	

4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses Perseorangan yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	1.495.604.181	APBD	3 Kali	1.525.516.265	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Penegakan Pelanggaran Kode Etik	3 Kali	37.818.810	APBD	3 Kali	38.575.186	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Penegakan Kode Etik DPRD	3 Kali	37.818.810	APBD	3 Kali	38.575.186	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah	5 Jenis	878.560.000	APBD	5 Jenis	896.131.200	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kegiatan yang dipublikasikan	5 Jenis	878.560.000	APBD	5 Jenis	896.131.200	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	340 Kali	1.864.368.434	APBD	340 Kali	1.901.655.803	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan	150 Kali	1.560.338.000	APBD	150 Kali	1.591.544.760	
						Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	40 Kali	289.328.969	APBD	40 Kali	295.115.548	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus yang difasilitasi	150 Kali	14.701.465	APBD	150 Kali	14.995.494	
TOTAL								35.253.419.540			35.958.487.931	

BAB V

PENUTUP

4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Rencana Anggaran Pada Tahun 2022 untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Timur sebesar Rp. 35,253,419,540,-. Untuk Anggaran Belanja.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Renja Kerja Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk mencapai target kinerja yang belum tercapai di tahun sebelumnya dan mempertahankan kinerja yang sudah tercapai.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa – masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur ini dapat menjadi pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan menuju Luwu Timur Terkemuka di Tahun 2022.









